

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK/PBB.....

No. : S-..... Tanggal
Lampiran : 1 (satu) Set
Hal : Permohonan Ijin Melakukan Penyanderaan

Yth. : Direktur Jenderal Pajak
u.p. Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak
di Jakarta

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini kami mengajukan permohonan ijin melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak (WP/PP) sebagai berikut :

I. IDENTITAS WP/PP

1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP :
3. Alamat :
4. Nama Penanggung Jawab :
5. NPWP (jika ada) :
6. Alamat :
7. Jabatan :
8. Umur/Tanggal Lahir :
9. Jenis Kelamin :
10. Agama :
11. Kewarganegaraan :
12. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) :

II. ALASAN PENYANDERAAN

1. Jumlah hutang pajak : Rp.
2. Penerbitan : Nomor :..... Tanggal :
diberitahukan kepada WP/PP Tanggal
3. Diragukan itikad baiknya dalam pelunasan pajak, antara lain:
.....

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengusulkan agar penyanderaan terhadap WP/PP yang namanya tercantum diatas dilaksanakan untuk..... bulan.

Untuk memenuhi persyaratan ijin penyanderaan. Bersama ini terlampir disampaikan formulir dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :/PJ./2003 tanggal..... Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.

Demikian disampaikan, apabila Bapak tidak berpendapat lain mohon dapat diproses lebih lanjut.

Kepala Kantor KPP/KPPBB

Nama
NIP

Tembusan

- Kepala Kantor Wilayah....., DJP

Nama Wajib Pajak :
 NPWP :
 Alamat :
 KPP/KPPBB :

1. Daftar Rincian Tunggakan Pajak

No.	No. STP /SKP	Jumlah Tunggakan	Pengurangan			Jumlah Pengurangan	Saldo Tunggakan	Ket.
			SSP (Rp)	PbK (Rp)	SK Keb. (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. Upaya Hukum Yang dilakukan Wajib Pajak/PP

Jenis	Nomor Surat/Tanggal	Putusan	Keterangan
Keberatan/PK Banding Kembali ke MA			

3. Tindakan Penagihan Aktif

No.	Tindakan Penagihan	No./Tanggal	Nomor Ketetapan	Jumlah Tunggakan	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Teguran				
2.	Surat Paksa				
3.	SPMP				
4.	Pengumuman Lelang				
5.	Lelang				
6.	Pencegahan				

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK/PBB

SURAT PERINTAH PENYANDERAAN

NO. :

Pertimbangan : Untuk kepentingan penagihan pajak dalam rangka mengamankan penerimaan keuangan Negara perlu dilakukan penyanderaan.

Dasar : 1. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
3. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia nomor : M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan Nomor : 294/KMK.03/2003 tanggal 25 Juni 2003
4. Surat Paksa Nomor :tanggal :, dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa nomor : tanggal;
5. Surat izin penyanderaan dari Menteri Keuangan nomor : tanggal;

DIPERINTAHKAN

1. Nama/NIP :
Pangkat :
Jabatan : Jurusita Pajak
2. Nama/NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Nama/NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Untuk : 1. a. Melakukan Penyanderaan Pajak dengan identitas sebagai berikut :
Nama :
Tempat/tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Agama :
b. Penyanderaan dilakukan dengan alasan Penanggung Pajak mempunyai utang pajak sebesar Rp
c. Penyanderaan dilaksanakan untuk bulan dan Penanggung Pajak ditempatkan di
2. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di tempat penyanderaan/ rumah tahanan negara.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
Kepala Kantor Pelayanan Pajak/PBB
.....

Nama
NIP

Pada hari ini tanggal Surat Perintah Penyanderaan diserahkan kepada Penanggung Pajak yang disandera.

Yang Menerima/Penanggung
Pajak yang Disandera

Yang Menyerahkan/Jurusita Pajak

(.....)

(.....)

Lampiran III
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : KEP-218/PJ/2003
Tanggal : 30 Juli 2003

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK/PBB.....

No.	: S-.....	Tanggal
Lampiran	: 1 (satu) Set	
Hal	: Permintaan Bantuan untuk Menangkap Penanggung Pajak yang akan Disandera yang Melarikan Diri atau Bersembunyi.	

Yth. : Kepala Kepolisian Resort
di
.....

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, telah diterbitkan Surat Perintah Penyanderaan oleh Kantor Pelayanan Pajak / Kantor Pelayanan PBB Nomor tanggal kepada Jurusita Pajak atas nama:

Nama/NIP	:
Pangkat/golongan	:
Jabatan	: Jurusita Pajak
Unit Kerja	:
Alamat Kantor	:

Mengingat Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan karena melarikan diri atau bersembunyi, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk melakukan penangkapan terhadap Penanggung Pajak dengan identitas sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak	:
NPWP	:
Alamat	:
Nama Penanggung Jawab	:
NPWP (jika ada)	:
Alamat	:
Jabatan	:
Umur/Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Kewarganegaraan	:
Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)	:

Dengan demikian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor KPP/KPPBB

Nama
NIP

Tembusan :
- Kepala Kantor Wilayah, DJP

Lampiran IV
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : KEP-218/PJ/2003
Tanggal : 30 Juli 2003

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK/PBB.....

No.	:	S-.....	Tanggal
Lampiran	:	1 (satu) Set	
Hal	:	Permintaan Bantuan	
		Pelaksanaan Penyanderaan	

Yth. : Kepala Kepolisian Resort
di

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini kami mohon bantuan Saudara kepada Jurusita atas nama:

Nama/NIP	:	
Pangkat/golongan	:	
Jabatan	:	Jurusita
Unit Kerja	:	
Alamat Kantor	:	
Nomor/Tanggal Surat Perintah Penyanderaan	:	

untuk melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penanggu Pajak dengan identitas sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak	:	
NPWP	:	
Alamat	:	
Nama Penanggung Jawab	:	
NPWP (jika ada)	:	
Alamat	:	
Jabatan	:	
Umur/Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Agama	:	
Kewarganegaraan	:	
Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)	:	

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor KPP/KPPBB

Nama
NIP

Tembusan :
- Kepala Kantor Wilayah DJP

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYANDERAAN
NOMOR :

Pada hari initanggalbulantahun atas kekuatan Surat Perintah Penyanderaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor tanggal....., yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam hal memilih domisili kantornya di berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal Nomor dan Surat Penyanderaan dari Menteri Keuangan Nomor tanggal....., maka saya, Jurusita Pajak :

Nama :
Umur :
NIP :
Pangkat :
Jabatan : Jurusita Pajak pada KPP/KPPBB.....
NPWP (jika ada) :
Alamat tempat tinggal :
.....

dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1. Nama/NIP :
Umur :
Pangkat :
Jabatan/Pekerjaan :
Alamat :
.....
2. Nama :
Umur :
Pangkat :
Jabatan/Pekerjaan :
Alamat :
.....

telah melakukan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Agama :
.....

di karena Penanggung Pajak mempunyai utang pajak sebesar Rp dan Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak.

Salinan berita Acara ini disampaikan kepada Kepala tempat penyanderaan/rumah tahanan negara, Penanggung Pajak yang bersangkutan, Bupati/ Walikota.

Penanggung Pajak

Jurusita Pajak,

.....
Kepala tempat penyanderaan/
rumah tahanan negara

.....
NIP
Saksi :

.....

1.

2.

Lampiran VI
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : KEP-218/PJ/2003
Tanggal : 30 Juli 2003

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK/PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SURAT IZIN KUNJUNGAN PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA
Surat Nomor : tanggal :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Alamat Kantor :
Jabatan : Ka KPP/KPPBB

Berdasarkan Surat Permohonan Nomor tanggal dengan ini kami memberikan izin kunjungan kepada ;

Nama :
No. KTP/SIM/Paspor :
Alamat :
Hubungan dengan PP :
NPWP (jika ada) :
Tanggal :
Jam : s/d

Terhadap Penanggung Pajak yang disandera :

Nama :
No. Surat Perintah Penyanderaan :
Nama Rutan :
Tanggal masuk Rutan :
Alamat Rutan :

Demikian izin kunjungan ini diberikan untuk digunakan dengan seperlunya.

Kepala KPP/KPPBB

.....
NIP

Lampiran VII
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : KEP-218/PJ/2003
Tanggal : 30 Juli 2003

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK/PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SURAT IZIN DIRAWAT DI RUMAH SAKIT DILUAR RUTAN
TERHADAP PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA
Surat Nomor :Tanggal :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Alamat Kantor :
Jabatan : Ka KPP/KPPBB

Berdasarkan surat keterangan dokter :

Nama/NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :

Memberikan izin untuk dirawat di Rumah Sakit selamahari sejak
.....sampai dengan terhadap Penanggung Pajak :

Nama :
No. Surat Perintah Penyanderaan :
Nama Rutan :
Tanggal masuk Rutan :
Alamat Rutan :

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan dengan seperlunya.

Lampiran VIII
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : KEP-218/PJ/2003
Tanggal : 30 Juli 2003

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK/PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

No.	: S-.....		Tanggal
Lampiran	: 1 (satu) set		
Hal	: Pemberitahuan Pelepasan		
	Penanggung Pajak yang Disandera		

Yth. : Kepala Rumah Tahanan Negara
di
.....

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 34 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini diberitahukan kepada Saudara untuk melepaskan Penanggung Pajak yang disandera dengan identitas sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak	:	
NPWP	:	
Alamat	:	
Nama Penanggung Pajak	:	
NPWP (jika ada)	:	
Alamat	:	
Jabatan	:	
Umur/Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Agama	:	
Kewarganegaraan	:	
Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)	:	
Nomor/Tanggal Surat Perintah	:	
Penyanderaan	:	
Masa Penyanderaan	:	s/d.....
Tempat Penyanderaan	:	RUTAN
Alamat Tempat Penyanderaan	:	

Bahwa Penanggung Pajak yang disandera dapat dilepas dengan alasan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : x³

- a. utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
- b. jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi;
- c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor KPP/KPPBB

Nama
NIP

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah, DJP

Lingkari sesuai dengan alasan penanggung pajak yang disandera.